

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Asthofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Bakti, 2004.
- Brotosusilo, Agus dan Jufrina Rizal. Filsafat Hukum. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Fatahna, Muclis dan Purwanto Joko. Notaris Bicara Soal Kenegaraan. Jakarta: Watampone Press, 2003.
- Habib, Adjie. Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem”. Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia. Surabaya, 2003.
- , Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Hasan, Alwi dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- HR., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Juwana, Hikmahanto. “Kumpulan Artikel Tentang Teori Hukum”. (Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).
- Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1984).
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. (Ujung Berung Bandung: Nuansa&Nusamedia, 2006).
- Koentjoro, Diana Hakim. Hukum Administrasi Negara. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Komar, Andasmita. *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2. (Bandung: Bandung Alumni, 1983).

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Majalah Renvoi. *Berita Daerah Mengenai Hindari Ketidakpatutan Walau Kecil*. Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008.

Majalah Renvoi. *Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi*. Majalah Renvoi Nomor 01/ 58. Maret.Th 50/ 2008.

Majalah Renvoi. *Tugas Notaris (perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi, Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006.

Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No.30 Tahun 2004. Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Indonesia. *Staatblad Tentang Peraturan Jabatan Notaris*. Peraturan No. 1860 no. 3.

Yudara N.G., *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta, 2006), Majalah Renvoi, Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006.

C. Lain-lain

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotarisan. Kepmen No: M 0L.H.T.03.01 Tahun 2003.

_____. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Kepmen No: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 .

_____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Permen No. M.02.PR08.10 Tahun 2004.

_____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Permen No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

_____. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. SK Dir Nomor. C.HT.03.10-05.

